

# Riau Bedelau

“RIAU BERBUDAYA MELAYU, DINAMIS, EKOLOGIS, AGAMIS DAN MAJU”



TIM KOORDINASI  
PENYELENGGARAAN  
RAD PD PROVINSI RIAU



TIM BIDANG  
PEMERINTAHAN  
PEMBANGUNAN  
MANUSIA



# PENGINTEGRASIAN RIPJPID DENGAN RPJMD PROVINSI RIAU

ACARA FORUM KOORDINASI, SINKRONISASI PENYUSUNAN RENCANA INDUK DAN PETA JALAN  
PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DI DAERAH (RIPJPID) PROVINSI RIAU TAHUN 2025 - 2029 DAN FORUM PERANGKAT  
DAERAH

RISET DAN INOVASI PROVINSI RIAU TAHUN 2025 DENGAN TEMA ACARA : BERSINERGI DAN BERKOLABORASI MEMBANGUN EKOSISTEM  
RISET DAN

INOVASI MENUJU RIAU BEDELAU.

TIM BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA BAPPEDA PROVINSI RIAU

MARET 2025

RIAU CERDAS, RIAU SEHAT, RIAU MANTAP, RIAU BEDAYA SAING, RIAU MEMBANGUN DESA MAJUKAN  
KOTA, RIAU SEJAHTERA





SALINAN

PERATURAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 2023  
TENTANG  
TATA KELOLA RISET DAN INOVASI DI DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan peran pengendalian Badan Riset dan Inovasi Nasional terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Riset dan Inovasi Daerah, perlu melakukan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan riset dan inovasi di daerah;
  - b. bahwa untuk penguatan dan pengembangan ekosistem riset dan inovasi di daerah untuk meningkatkan daya saing daerah, perlu disusun tata kelola riset dan inovasi di daerah;
  - c. bahwa belum ada pengaturan mengenai tata kelola riset dan inovasi di daerah, sehingga perlu diatur;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah;

## Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional RI Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah

### Bagian Ketiga Pemanfaatan Riset dan Inovasi

#### Pasal 15

Riset dan Inovasi dimanfaatkan untuk:

- a. perumusan kebijakan dalam perencanaan pembangunan daerah;
- b. landasan pengambilan keputusan;
- c. peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola Pemerintahan Daerah;
- d. naskah akademik untuk penyusunan peraturan daerah; dan/atau
- e. solusi permasalahan pembangunan.

### BAB IV KOORDINASI DAN SINKRONISASI

#### Bagian Kesatu

Mekanisme Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Riset dan Inovasi di Daerah

#### Pasal 16

Dalam rangka menyinergikan penyelenggaraan Riset dan Inovasi di daerah dan memperkuat tugas dan fungsi BRIDA, diselenggarakan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan Riset dan Inovasi di daerah.

#### Pasal 17

- (1) Kepala melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan Riset dan Inovasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Pemanfaatan Riset dan Inovasi dimanfaatkan untuk :

1. Perumusan Kebijakan dan Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Landasan Pengambilan Keputusan
3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Daerah
4. Naskah Akademik untuk penyusunan peraturan daerah dan /atau
5. Solusi permasalahan pembangunan

### Bagian Kedua Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah

#### Pasal 26

- (1) Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat sistemik, komprehensif, dan partisipatif memuat peran ilmu pengetahuan dan teknologi atau Riset dan Inovasi di dalam mengatasi permasalahan prioritas pembangunan daerah.
- (2) Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau disesuaikan dengan jangka waktu dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah.

#### Pasal 27

- (1) Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah provinsi disusun oleh BRIDA provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah kabupaten/kota disusun oleh BRIDA kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), BRIDA melakukan koordinasi, sinergi, dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan.
- (4) Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun berdasarkan program prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPJMD atau RPD untuk dipercepat capaian target programnya.
- (5) Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan memperhatikan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah provinsi.

Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah

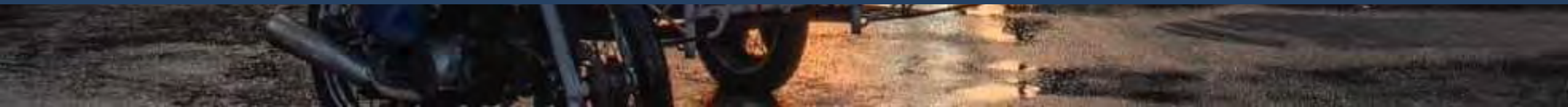
- ❑ Pasal 26 ayat 1 RIPJIPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat sistemik, komprehensif, dan partisipatif memuat peran ilmu pengetahuan dan teknologi riset dan inovasi di **dalam mengatasi permasalahan prioritas pembangunan daerah**
- ❑ Pasal 27 ayat 4 RIPJIPD sebagai mana dimaksud **disusun berdasarkan program prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPJMD atau RPD untuk percepatan capaian target Program**



# GAMBARAN UMUM

(Pertumbuhan Ekonomi, Kondisi Makro, Demografi Kependudukan, Potensi Komoditas Unggulan, Kondisi Kemiskinan dan Kondisi Ketenagakerjaan )

## PROVINSI RIAU







Berita Resmi Statistik No. 10/02/14/Th. XXVI, 5 Februari 2025

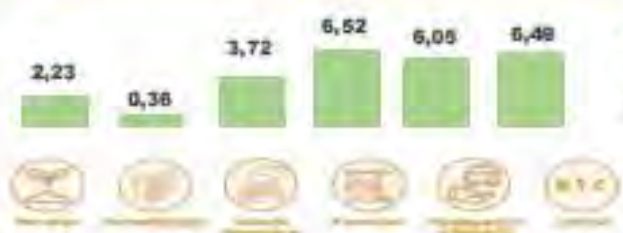
| Q-TO-Q | Y-ON-Y | C-TO-C | PDRB HARGA BERLAKU Rp. 1.112,48 Triliun |
|--------|--------|--------|-----------------------------------------|
| 0,16%  | 3,52%  | 3,52%  | PDRB HARGA KONSTAN Rp. 571,23 triliun   |



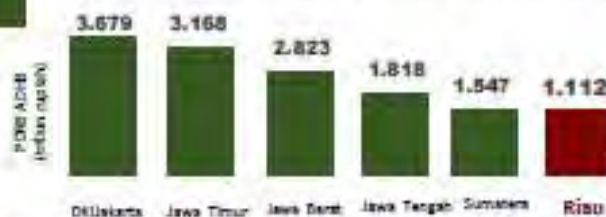
PERTUMBUHAN PDRB RIAU 2018-2024  
(Persen)



PERTUMBUHAN PDRB RIAU MENURUT LAPANGAN USAHA  
TAHUN 2024 (c-to-c) (Persen)



PROVINSI DENGAN PDRB TERBESAR SE - INDONESIA



PERTUMBUHAN DAN KONTRIBUSI PDR  
DI PULAU SUMATERA



Sumber : Badan Pusat Statistik

## KONDISI PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI RIAU TAHUN 2024

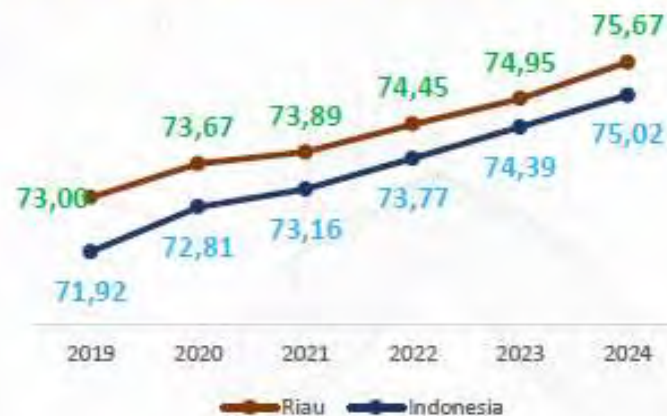
- ❑ Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau Pada tahun 2024 sebesar 3,52 % mengalami penurunan dari tahun 2023
- ❑ Pertumbuhan PDRB Riau menurut Lapangan Usaha Tahun 2024 terbesar di sektor Konstruksi sebesar 6,52% , Lainnya 6,49% perdagangan dan reparasi sebesar 6,05%
- ❑ Pertumbuhan PDRB Riau menurut pengeluaran terbesar pada Pengeluaran Komsumsi LNPRRT Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga sebesar 13,01% dan Ekspor Luar negeri mengalami – 4,34%
- ❑ PDRB Provinsi Riau terbesar ke-5 nasional dan ke-2 di Sumatera setelah Sumatera Utara dengan kontribusi 1.112



## PERTUMBUHAN EKONOMI



## INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA



## KOMPONEN IPM



## TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (%)



## TINGKAT KEMISKINAN (%)



## GINI RASIO







PE (2023) : 2,83 %  
IPM (2024) : 71,20  
TPT (2024) : 4,31%  
T. Kemiskinan (2024) : 7,01 %  
K.E. (2023) : 0,29%  
Luas : 9.154,72 km<sup>2</sup>  
Penduduk : 673.320 Jiwa



PE (2023) : 6,06%  
IPM (2024) : 82,89  
TPT (2024) : 4,63%  
T. Kemiskinan (2024) : 3,14%  
K.E. (2023) : 0,2%  
Luas : 633,40 km<sup>2</sup>  
Penduduk : 1.026.670 Jiwa



PE (2023) : 4,12%  
IPM (2024) : 71,82  
TPT (2024) : 2,73%  
T. Kemiskinan (2024) : 9,62%  
K.E. (2023) : 1,39%  
Luas : 7.527,43 km<sup>2</sup>  
Penduduk : 593.490 Jiwa



PE (2023) : 4,22%  
IPM (2024) : 74,85  
TPT (2024) : 3,67%  
T. Kemiskinan (2024) : 6,92%  
K.E. (2023) : 0,36%  
Luas : 11.289,28 km<sup>2</sup>  
Penduduk : 894.850 Jiwa



PE (2023) : 2,87%  
IPM (2024) : 72,33  
TPT (2024) : 2,48%  
T. Kemiskinan (2024) : 7,89%  
K.E. (2023) : 0,58%  
Luas : 5.272,74 km<sup>2</sup>  
Penduduk : 349.250 Jiwa



PE (2023) : 6,06%  
IPM (2024) : 76,19  
TPT (2024) : 4,66%  
T. Kemiskinan (2024) : 3,15%  
K.E. (2023) : 0,0%  
Luas : 2.177,80 km<sup>2</sup>  
Penduduk : 333.030 Jiwa



PE (2023) : 2,77%  
IPM (2024) : 75,28  
TPT (2024) : 5,88%  
T. Kemiskinan (2024) : 6,36%  
K.E. (2023) : 0,0%  
Luas : 8.520,44 km<sup>2</sup>  
Penduduk : 591.800 Jiwa



PE (2023) : 4,35%  
IPM (2024) : 75,45  
TPT (2024) : 4,53%  
T. Kemiskinan (2024) : 5,08%  
K.E. (2023) : 0,54%  
Luas : 7.843,97 km<sup>2</sup>  
Penduduk : 483.750 Jiwa



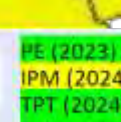
PE (2023) : 4,81%  
IPM (2024) : 67,92  
TPT (2024) : 4,51%  
T. Kemiskinan (2024) : 23,15%  
K.E. (2023) : 8,55%  
Luas : 3.636,79 km<sup>2</sup>  
Penduduk : 213.720 Jiwa



PE (2023) : 4,69%  
IPM (2024) : 74,08  
TPT (2024) : 2,13%  
T. Kemiskinan (2024) : 8,49%  
K.E. (2023) : 1,22%  
Luas : 13.020,19 km<sup>2</sup>  
Penduduk : 414.940 Jiwa



PE (2023) : 3,17%  
IPM (2024) : 68,38  
TPT (2024) : 1,86%  
T. Kemiskinan (2024) : 5,66%  
K.E. (2023) : 0,4%  
Luas : 13.465,89 km<sup>2</sup>  
Penduduk : 684.860 Jiwa



PE (2023) : 4,39%  
IPM (2024) : 71,48  
TPT (2024) : 2,55%  
T. Kemiskinan (2024) : 6,02%  
K.E. (2023) : 1,63%  
Luas : 7.978,17 km<sup>2</sup>  
Penduduk : 468.370 Jiwa

Luas Wilayah = 90.12876 km<sup>2</sup> (RTRWP Riau)  
Wilayah Administrasi = 12 Kabupaten/Kota  
Jumlah Penduduk Th. 2023 = 6.728.050 jiwa  
(BPS, Tahun 2024)

## Indikator Makro Provinsi Riau :

P.ekonomi (PE-2023) : 4,21% (2023) ↓  
**3,52% (2024) ↓**  
IPM (2024) : 74,79  
TPT (2024) : 3,70 %  
Tingkat Kemiskinan (2024) : **6,67%** ↑  
Kemiskinan Ekstrem (K.E.) : 0,67% (2023) ↑,  
**0,43% (2024) ↓**



## KETERANGAN

Capaian lebih baik dari provinsi

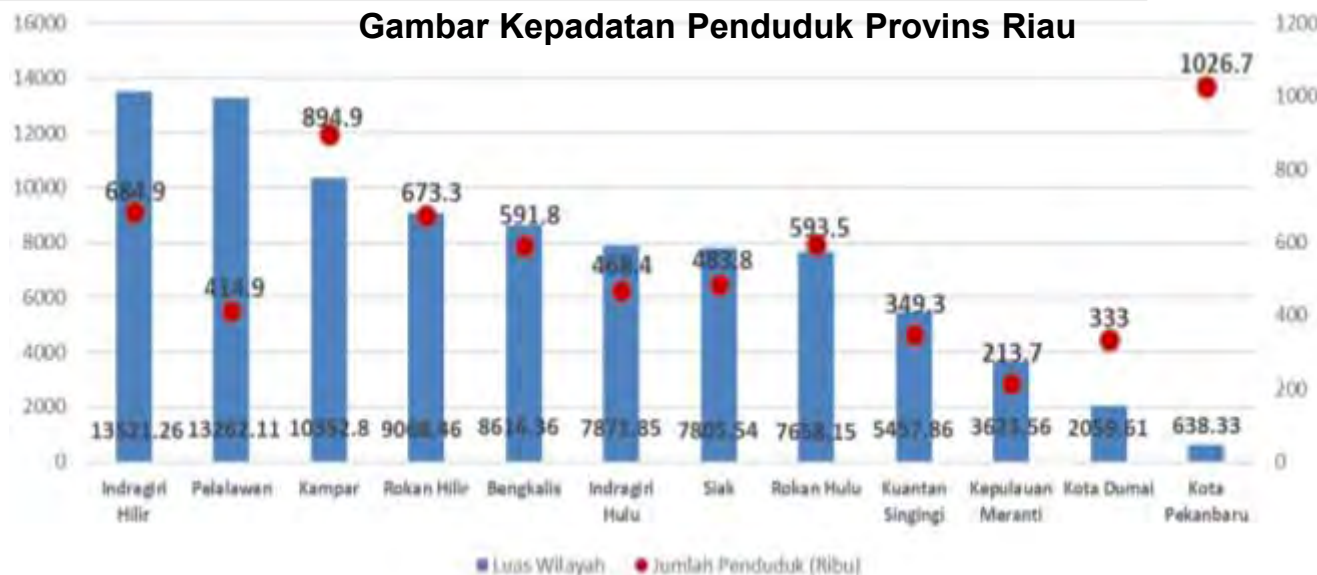
Capaian dibawah provinsi

\* Capaian Kab/Kota Tahun 2023/2024

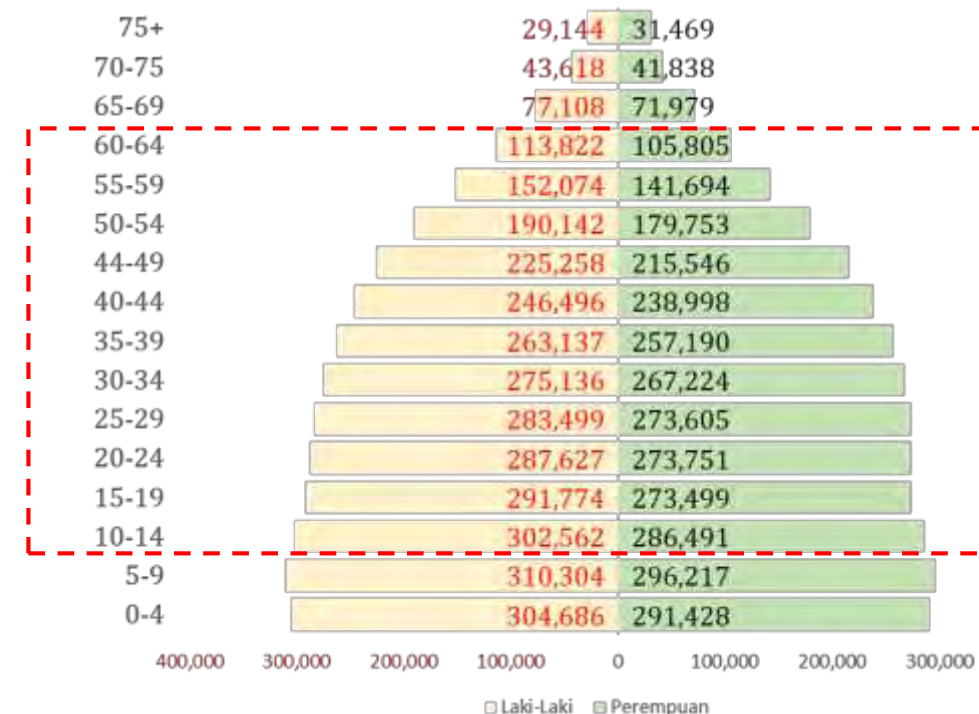




Data Jumlah Penduduk Provinsi Riau Kelompok Umur 2023(BPS 2023)



Luas Wilayah Riau (Km2) 89.935,89 (BPS 2023) dengan Jumlah Penduduk Riau sebanyak 6.728.100 Jiwa (BPS 2024)



- ❑ Terdapat kondisi **ketimpangan** antara **luas wilayah** dan **jumlah penduduk** di Kota Pekanbaru dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai 1.620,89 jiwa/ Km<sup>2</sup> atau dengan persentase penduduk sebesar 15,25% dari total penduduk di Provinsi Riau pada Tahun 2024 berdasarkan sebaran dan distribusi penduduk
- ❑ Laju pertumbuhan mencapai 1,35%, Peningkatan jumlah penduduk tentunya menjadi sumber kekuatan besar Sumber Daya Manusia yang maju untuk bisa dimanfaatkan dalam kontribusi pembangunan
- ❑ **Bonus demografi** dengan penduduk usia produktif (15-64 tahun) pada tahun 2023 sebesar 4.683.0170 jiwa (68,64%) dengan persentase angka rasio ketergantungan 45,80 %



## KOMODITAS UNGGULAN DI PROVINSI RIAU



### 1. Kelapa Sawit

Luas : 3.409.500.204 Ha  
Produksi : 9.403.231.678 Ton  
hasil produksi terbesar  
Lokasi : 12 Kabupaten/Kota  
Jumlah PKS : 287 PKS  
Industri Biodiesel : 8 perusahaan

### 2. Karet

Luas : 413.162.768  
Produksi : 352.181.984 Ton  
Penghasil karet  
terbesar ke-3 se- Indonesia  
Lokasi : 12 Kabupaten /Kota  
Tujuan Eksport : 5 Negara



### 3. Kelapa

Luas : 415.895.938 Ha  
Produksi : 384.428.774 Ton  
Lokasi : Seluruh Kab/kota,  
terbesar di Kab. Indragiri Hilir



### 5. Pinang

Luas : 22.582.982 Ha  
Produksi : 11.402,5 Ton  
Lokasi : Kab Kampar,  
Kab Siak, Kab Kuansing, Kab  
Inhil dan Kab. Kep. Meranti



### 4. Lagu

Luas : 66.786,36 Ha  
lahan terluas hasil produksi  
terbesar  
Produksi : 287.084.842 Ton  
Lokasi : Kabupaten Pelalawan, Bengkalis,  
Indragiri Hilir, Siak dan terbesar di Kep.  
Meranti



### 6. Kopi

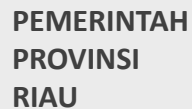
Luas : 4.689,48 Ha  
Produksi : 1.842.083 Ton  
Perusahaan : 49 Perusahaan  
Lokasi : Kab. Kep. Meranti



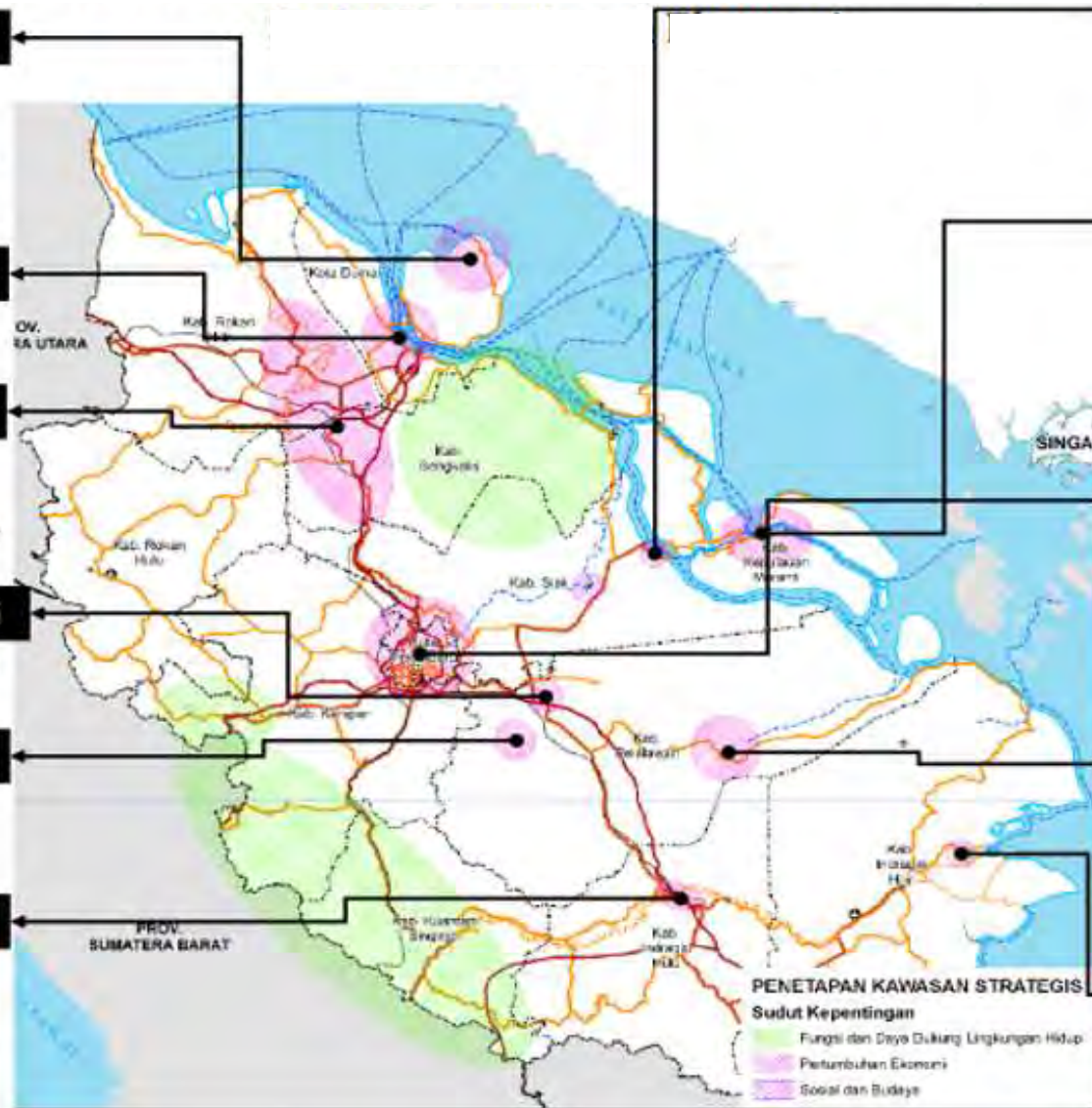
- Rendahnya nilai tambah komoditi akibat belum berkembangnya hilirisasi
- Rendahnya produktivitas Perkebunan kelapa sawit rakyat
- Tata Niaga Pertanian belum optimal
- Masih banyaknya bibit tidak bersertifikat yang beredar
- Terbatasnya kemitraan
- Kebun dalam Kawasan hutan
- Kapasitas sumber daya manusia pasca panen masih terbatas

## PERMASALAHAN





- Rencana pengembangan sektor unggulan (industri pengolahan dan pertanian) sebagai pusat pertumbuhan baru untuk wilayah Riau bagian selatan.



### Kawasan Maritim Gaung Anak Serka

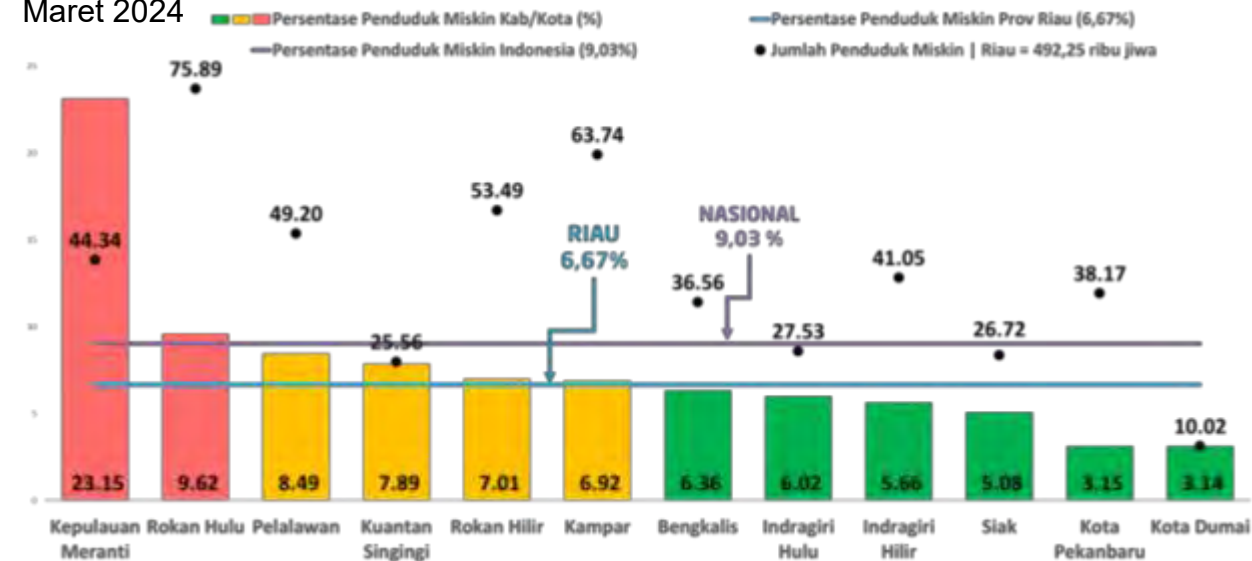
-  Satu pusat pengembangan industri perkapalan dan hilirisasi komoditas pertanian di provinsi riau





## Angka Kemiskinan

Maret 2024

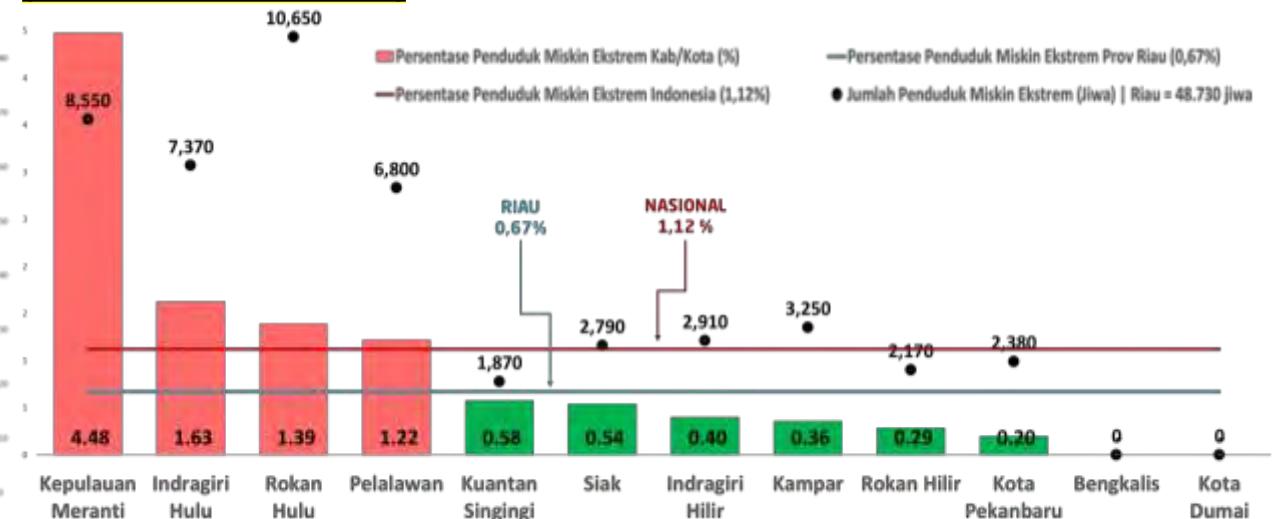


| Kode | Provinsi/Kabupaten/Kota<br>(* Peringkat % Terendah Kab/Kota) | Persentase Penduduk Miskin (persen) |       | Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa) |        |
|------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|------------------------------------|--------|
|      |                                                              | 2023                                | 2024  | 2023                               | 2024   |
| 14   | Provinsi Riau (13/38)                                        | 6,68                                | 6,67  | 485,66                             | 492,25 |
| 1401 | Kuantan Singingi (203/514)                                   | 8,07                                | 7,89  | 26,10                              | 25,56  |
| 1402 | Indragiri Hulu (115/514)                                     | 6,06                                | 6,02  | 27,40                              | 27,53  |
| 1403 | Indragiri Hilir (98/514)                                     | 5,64                                | 5,66  | 40,86                              | 41,05  |
| 1404 | Pelalawan (226/514)                                          | 8,15                                | 8,49  | 45,30                              | 49,20  |
| 1405 | Siak (75/514)                                                | 5,23                                | 5,08  | 26,99                              | 26,72  |
| 1406 | Kampar (159/514)                                             | 7,04                                | 6,92  | 63,84                              | 63,74  |
| 1407 | Rokan Hulu (266/514)                                         | 9,72                                | 9,62  | 74,38                              | 75,89  |
| 1408 | Bengkalis (128/514)                                          | 6,31                                | 6,36  | 36,10                              | 36,56  |
| 1409 | Rokan Hilir (169/514)                                        | 7,07                                | 7,01  | 53,04                              | 53,49  |
| 1410 | Kepulauan Meranti (472/514)                                  | 22,98                               | 23,15 | 43,82                              | 44,34  |
| 1471 | Kota Pekanbaru (15/514)                                      | 3,16                                | 3,15  | 37,67                              | 38,17  |
| 1473 | Kota Dumai (13/514)                                          | 3,21                                | 3,14  | 10,15                              | 10,02  |

## Angka Kemiskinan Ekstrem

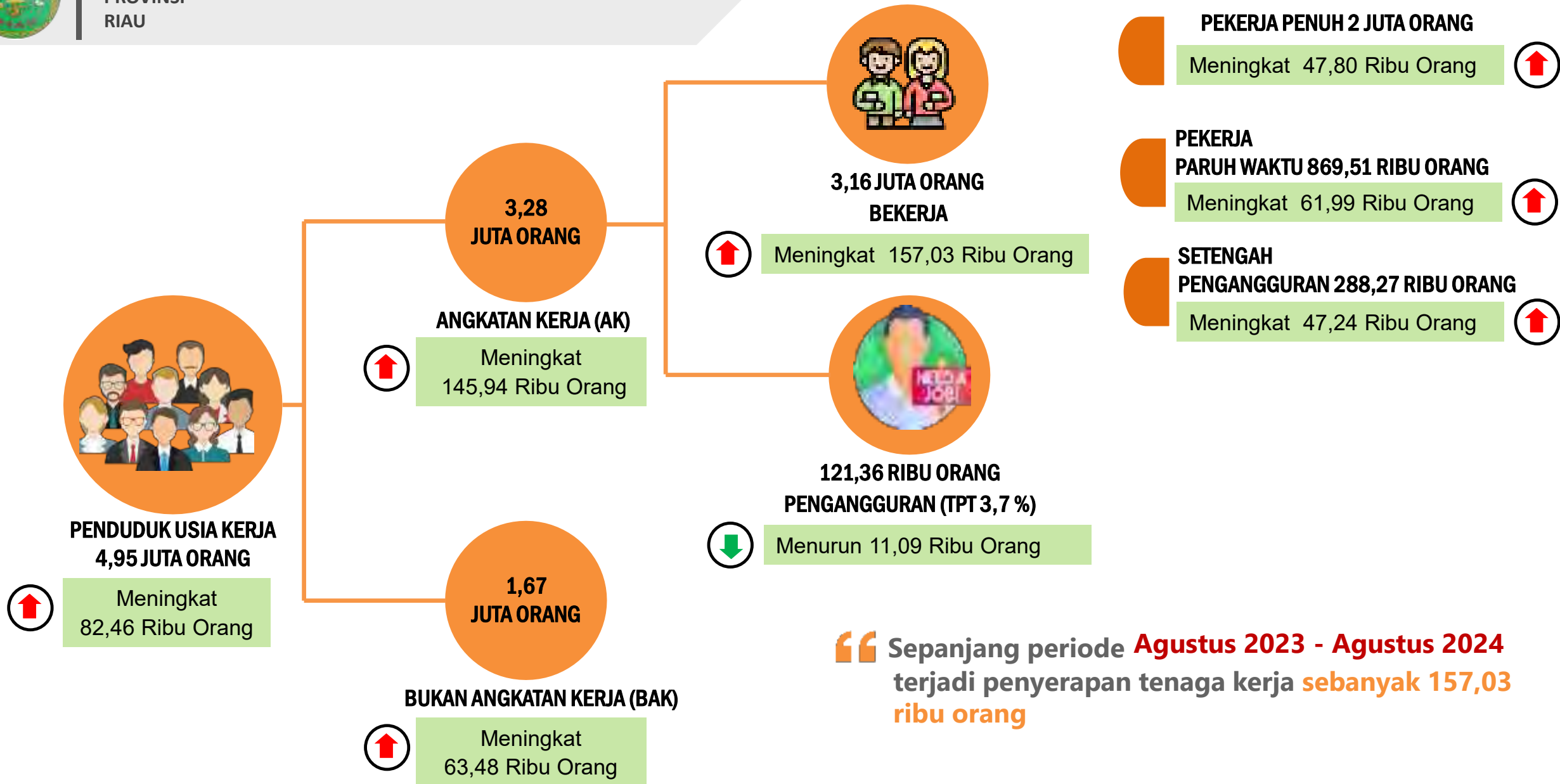
(Riau, Maret 2024: 0,43%)

(Posisi Relatif antar Kabupaten/Kota)



| Kode | Provinsi/<br>Kabupaten/ Kota | Persentase Penduduk Miskin Ekstrem (Persen) |       |        | Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem (Ribuan Jiwa) |        |        |
|------|------------------------------|---------------------------------------------|-------|--------|----------------------------------------------|--------|--------|
|      |                              | 2021*                                       | 2022* | 2023** | 2021*                                        | 2022*  | 2023** |
| 14   | Provinsi Riau                | 1,12                                        | 1,40  | 0,67   | 78,63                                        | 100,33 | 48,73  |
| 1401 | Kuantan Singingi             | 1,25                                        | 1,51  | 0,58   | 4,04                                         | 4,88   | 1,87   |
| 1402 | Indragiri Hulu               | 0,32                                        | 2,49  | 1,63   | 1,43                                         | 11,15  | 7,37   |
| 1403 | Indragiri Hilir              | 1,53                                        | 0,69  | 0,40   | 11,01                                        | 5,02   | 2,91   |
| 1404 | Pelalawan                    | 1,92                                        | 1,81  | 1,22   | 9,82                                         | 9,65   | 6,80   |
| 1405 | Siak                         | 0,95                                        | 1,27  | 0,54   | 4,73                                         | 6,42   | 2,79   |
| 1406 | Kampar                       | 1,00                                        | 1,73  | 0,36   | 8,77                                         | 15,45  | 3,25   |
| 1407 | Rokan Hulu                   | 2,07                                        | 1,90  | 1,39   | 14,86                                        | 14,08  | 10,65  |
| 1408 | Bengkalis                    | 0,70                                        | 0,60  | 0,00   | 3,99                                         | 3,40   | 0,00   |
| 1409 | Rokan Hilir                  | 0,98                                        | 2,06  | 0,29   | 7,09                                         | 15,16  | 2,17   |
| 1410 | Kepulauan Meranti            | 6,39                                        | 5,53  | 4,48   | 12,06                                        | 10,50  | 8,55   |
| 1471 | Kota Pekanbaru               | 0,00                                        | 0,34  | 0,20   | 0,00                                         | 4,01   | 2,38   |
| 1473 | Kota Dumai                   | 0,27                                        | 0,20  | 0,00   | 0,83                                         | 0,62   | 0,00   |

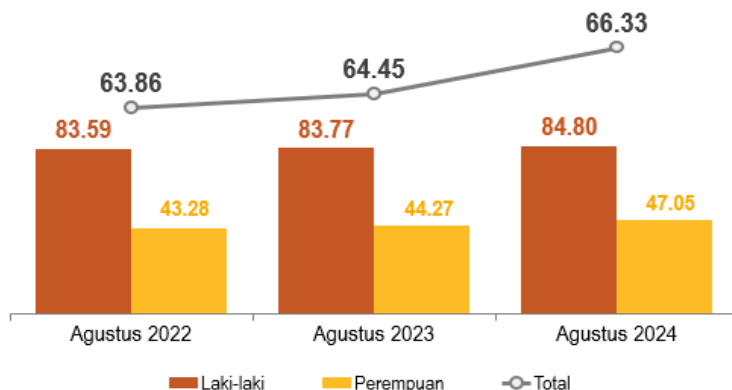




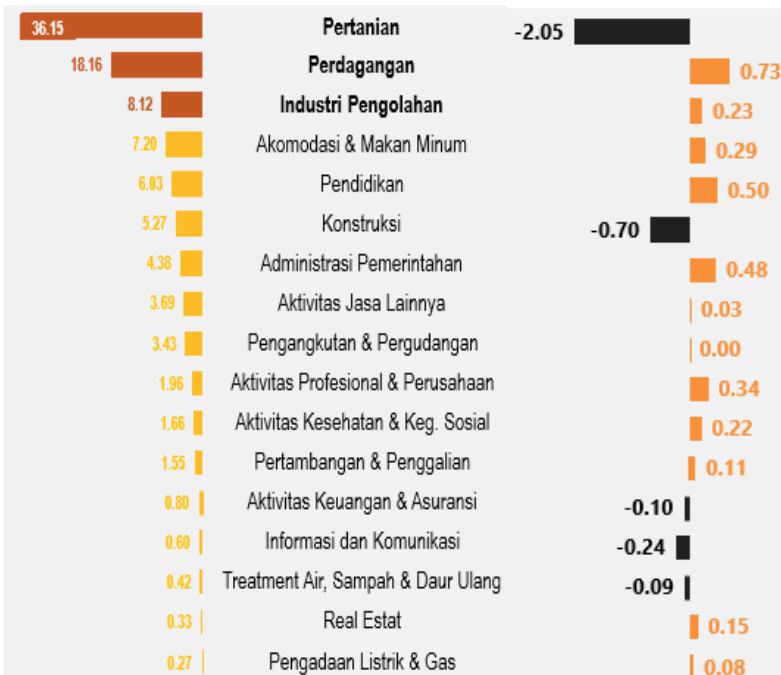




## TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA



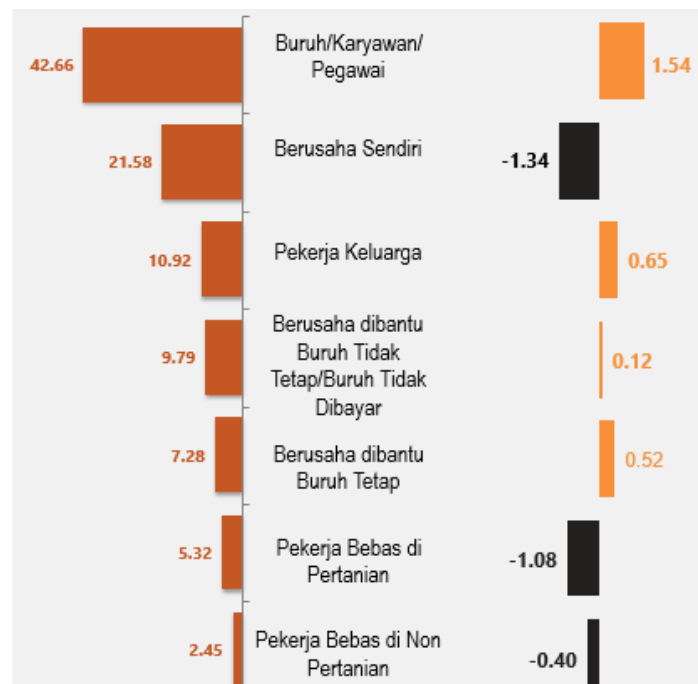
## PENYERAPAN TENAGA KERJA MENURUT LAPANGAN USAHA



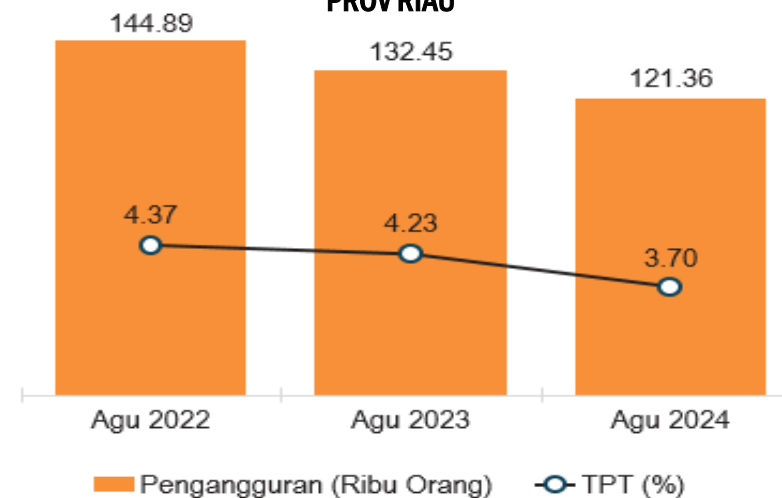
## PROPORSI PEKERJA FORMAL DAN INFORMAL



## PENDUDUK BERKERJA MENURUT STATUS PEKERJAAN UTAMA



## PERKEMBANGAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA PROV RIAU



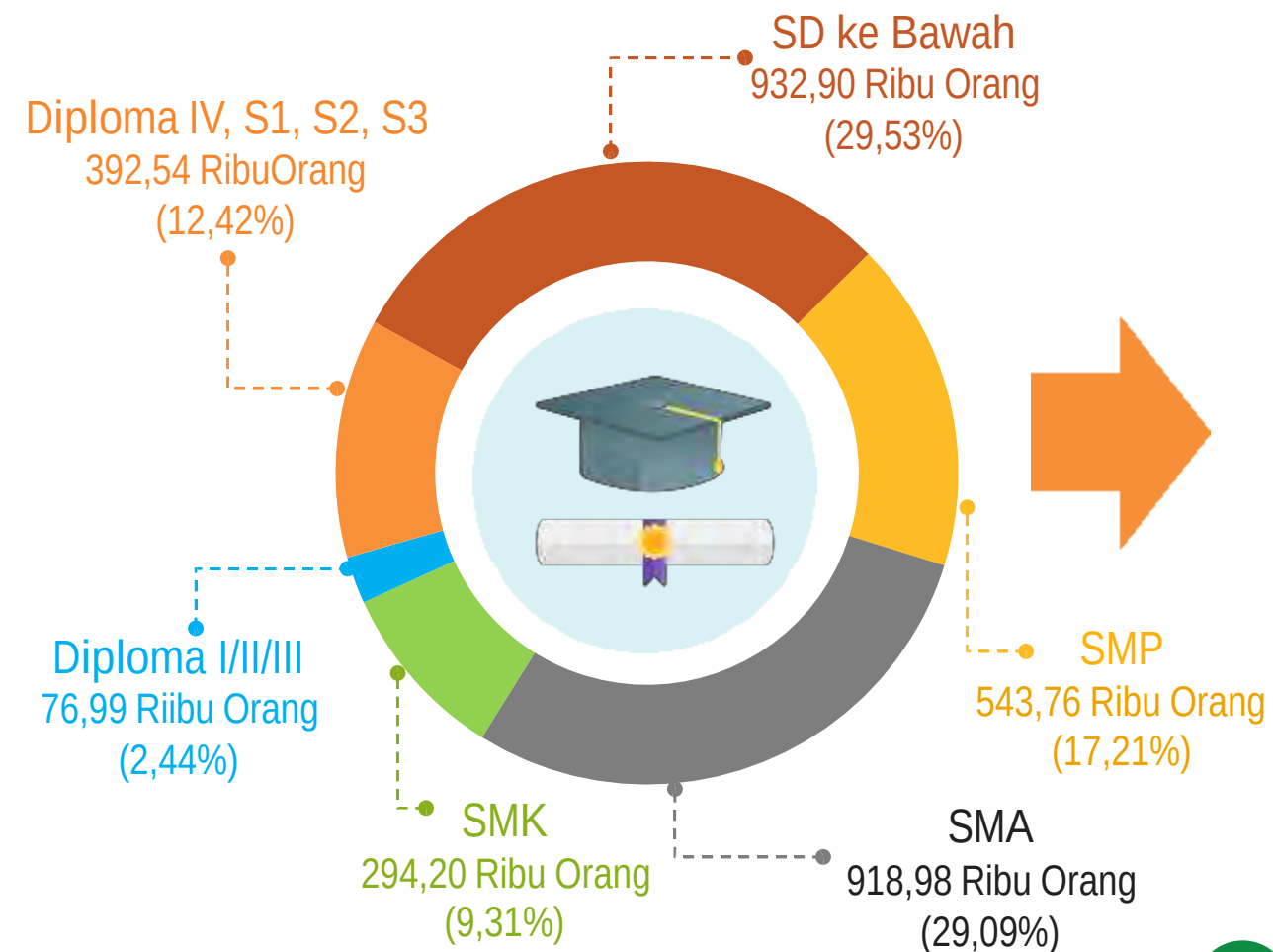
- ❑ Jumlah Angkatan Kerja 2024, 3,28 Juta Orang. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 2024 66,33% meningkat 1,88 persen dari 2023
- ❑ Penduduk yang Bekerja 3,16 Juta Orang. Lapangan pekerjaan yang mendominasi adalah Pertanian (36,15%), Perdagangan (18,16%), Industri Pengolahan (8,12%)
- ❑ Pekerja Informal tercatat sebanyak 50,07% (1,58 Juta Orang) turun sebesar 2,06% dari 2023 dan Proporsi Pekerja Formal meningkat didorong dengan peningkatan pekerja dengan status buruh/karyawan/pegawai
- ❑ Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 3,70% turun dari tahun 2023





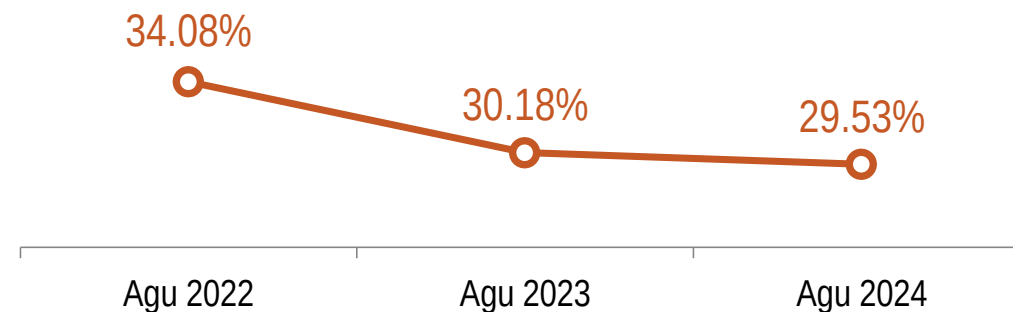
## TINGKAT PENDIDIKAN PENDUDUK BEKERJA

Sekitar 14,86% dari total penduduk bekerja berpendidikan tinggi (Diploma ke Atas)



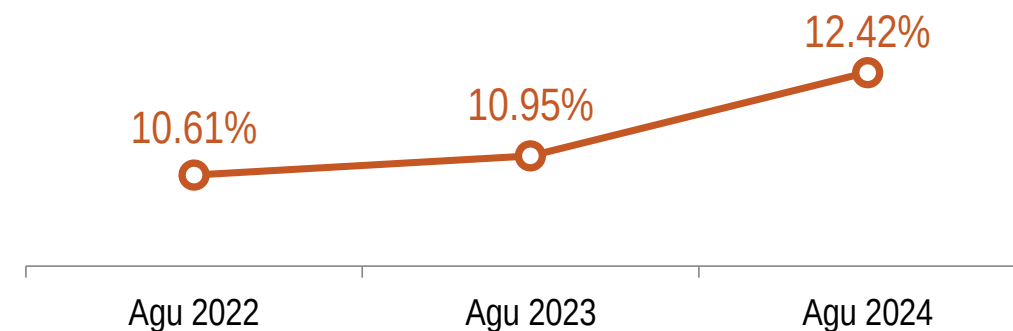
### Penduduk Bekerja Berpendidikan SD Ke Bawah

*Penduduk bekerja berpendidikan SD ke bawah cenderung menurun selama periode Agustus 2022–Agustus 2024*



### Penduduk Bekerja Lulusan Diploma IV, S1, S2, S3

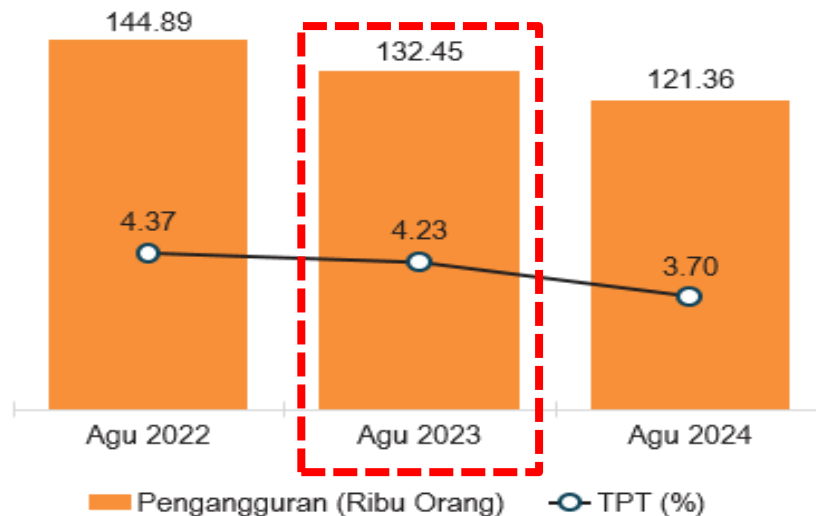
*Penduduk bekerja lulusan Diploma IV, S1, S2, S3 cenderung meningkat selama periode Agustus 2022–Agustus 2024*







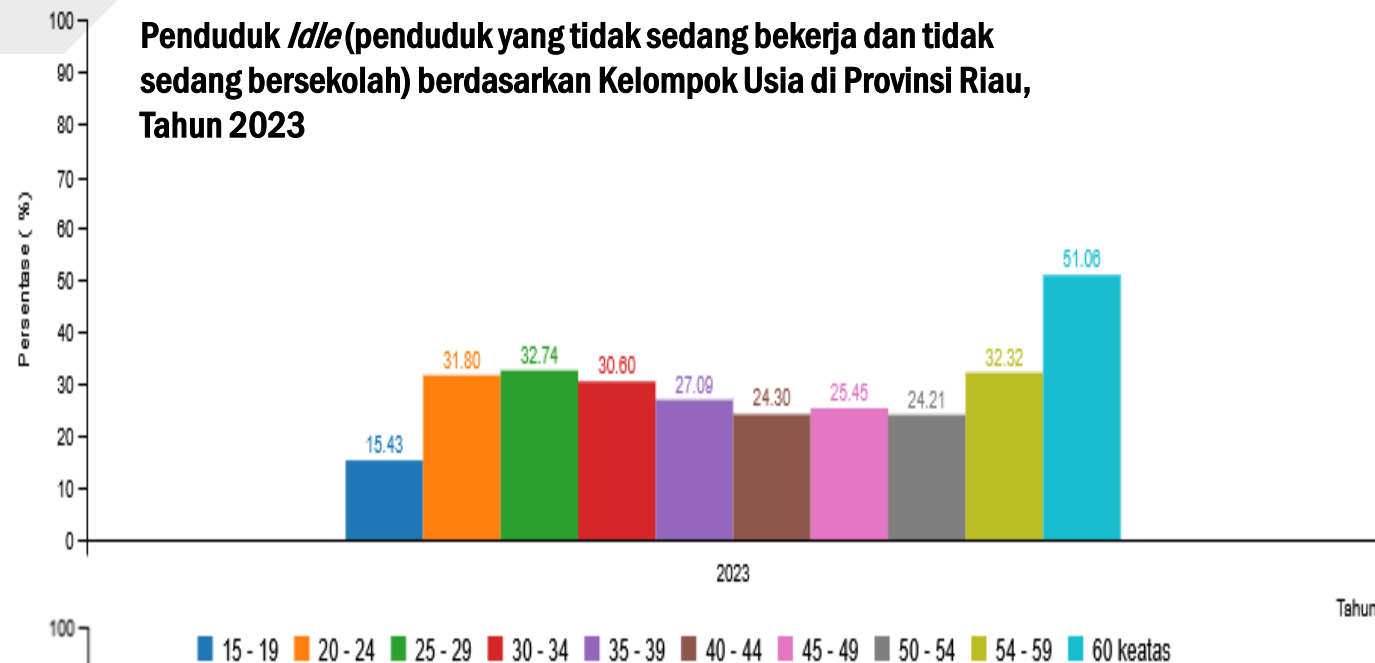
### PERKEMBANGAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA PROV RIAU



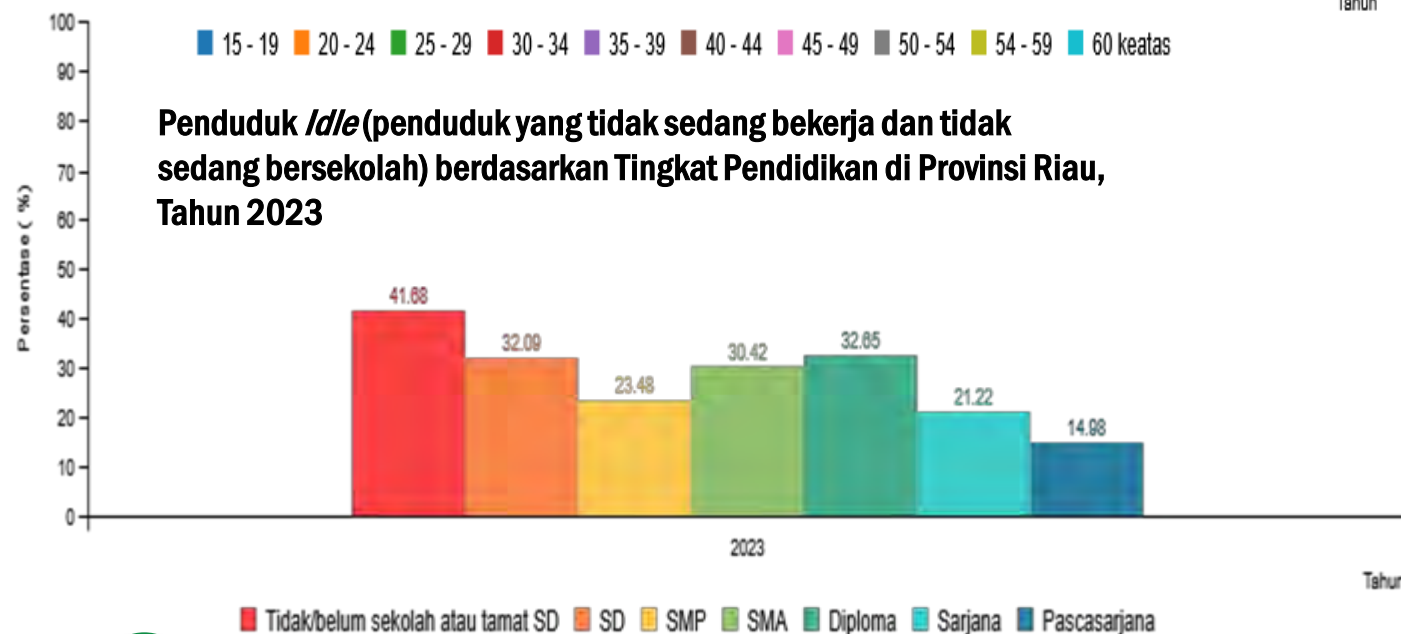
Pada tahun 2023 pengangguran 4,23 % dari angka pengangguran yang ada (berdasarkan data registrasi sosial ekonomi 2023) terdapat :

- ❑ Penduduk Idle (penduduk yang tidak sedang bekerja dan tidak sedang bersekolah) berdasarkan kelompok usia di Provinsi Tahun 2023 dimana pada kelompok usia 20-24 sebanyak 31,80%, 25-29 sebanyak 32,74%, 30-34 sebanyak 30,60% dan 54-59 sebanyak 32,32% yang artinya masih tingginya penduduk usia kerja (produktif) yang tidak sedang berkerja dan tidak bersekolah)
- ❑ Pada tingkat Pendidikan Penduduk Idle (penduduk yang tidak sedang bekerja dan tidak sedang bersekolah) banyak pada tingkat SD sebanyak 32,09% dan Diploma 32,65% serta pada tingkatan tidak/belum sekolah atau tamat SD

### Penduduk *Idle* (penduduk yang tidak sedang bekerja dan tidak sedang bersekolah) berdasarkan Kelompok Usia di Provinsi Riau, Tahun 2023



### Penduduk *Idle* (penduduk yang tidak sedang bekerja dan tidak sedang bersekolah) berdasarkan Tingkat Pendidikan di Provinsi Riau, Tahun 2023





## 1. Belum optimalnya pembangunan sumber daya manusia sehat, cerdas, kreatif, unggul dan sejahtera

1. Indeks pendidikan Provinsi Riau pada tahun 2024 baru mencapai 0,687 poin. Dimana terdapat tiga kabupaten di Provinsi Riau yang memiliki Indeks pendidikan terendah yaitu Kabupaten Indragiri hilir (0,583 poin), Kabupaten Kepulauan Meranti (0,628 point) dan Kabupaten Indragiri Hulu (0,631 poin), hal tersebut dipengaruhi oleh rendahnya akses pendidikan baik itu berupa kesulitan akibat karekteristik wilayah yang berawa, bergambut, pulau-pulau yang tersebar sulit untuk dijangkau dan jarak tempuh yang lama dari tempat tinggal ke sekolah.
2. Provinsi Riau masih mengalami kendala dalam hal fasilitas dan tenaga kesehatan khususnya pada aspek ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, dan kualitas, serta penerapan dalam hal sistem jaminan kesehatan nasional dimana kepesertaan belum mencapai target yang diharapkan.
3. Masih belum optimalnya layanan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Provinsi Riau dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya masih belum optimalnya upaya peningkatan kualitas layanan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terutama didalam panti termasuk belum terpenuhi sarana dan prasarana yang memadai dan belum optimalnya upaya peningkatan kelembagaan PSKS.

## 2. Belum Optimalnya Pengembangan Nilai Tambah Ekonomi Yang Produktif

1. Masih kurangnya investasi yang mendorong hilirisasi produk komoditi unggulan Provinsi Riau, sehingga produk komoditi unggulan tersebut diekspor keluar dalam bentuk bahan baku atau setengah jadi. Hal ini mengakibatkan masih rendahnya nilai tambah yang didapatkan daerah dan sedikitnya penyerapan tenaga kerja lokal akibat belum tersedia tenaga kerja lokal. Disamping itu masih kurangnya inovasi teknologi hilirisasi produk komoditi unggulan yang berkembang dimasyarakat juga mempengaruhi proses hilirisasi tersebut.
2. Masih terbatasnya skala usaha pelaku UMKM mengakibatkan belum mampu bersaing di pasar lokal dan global. Hal ini mengakibatkan UMKM yang ada belum mampu membangun kemitraan dengan perusahaan menengah dan besar di Provinsi Riau.

## 3. Belum optimalnya penyediaan, konektivitas transportasi dan pemerataan infrastruktur pembangunan yang berkualitas dan ramah lingkungan

1. Dukungan infrastruktur belum optimal dalam membangun konektivitas antar wilayah yang memiliki potensi investasi dengan dukungan sarana dan prasarana perhubungan publik serta konektivitas yang minim menyebabkan potensi ekonomi dan peningkatan kesejahteraan sosial di wilayah yang masih terpencil menjadi belum maksimal.
2. Kondisi jalan yang rusak sangat mempengaruhi kinerja ekonomi, dimana pada tahun 2024 persentase jalan provinsi dengan kondisi tidak mantap masih mencapai angka 31,60% (kerusakan ringan sampai rusak berat).

## 4. Masih tingginya pengaruh ekonomi global dan regional serta tingginya ketimpangan pembangunan wilayah

1. Perlambatan pertumbuhan ekonomi di beberapa negara yang menjadi tujuan ekspor Riau, sehingga dapat memberi efek pada perdagangan global dan terjadinya fluktuasi harga Crude Palm Oil (CPO) yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti perubahan iklim, rendahnya stok CPO, dan inflasi.
2. Masih terdapat kesenjangan kemiskinan antar daerah yang dipengaruhi oleh jumlah penduduk miskin, tingkat kemiskinan, garis kemiskinan, indeks keparahan kemiskinan, indeks kedalaman kemiskinan yang berbeda antar satu wilayah dengan wilayah lainnya.





## 5. Belum optimalnya tatakelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif

1. Belum sinkronisasi tatakelola perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dan umpan balik perbaikan selama proses tatakelola.
2. Belum optimalnya tatakelola ASN di Provinsi Riau, hal ini dipengaruhi oleh manajemen ASN, penerapan merit sistem, peningkatan kompetensi ASN, penerapan Reward and Punishment, rendahnya minat/kesadaran ASN untuk peningkatan kompetensinya.

## 6. Adanya potensi degradasi kualitas lingkungan hidup

1. Permasalahan degradasi lingkungan hidup dapat dilihat dari masih tingginya emisi gas rumah kaca. Tingginya emisi gas rumah kaca salah satunya disumbangkan dari sektor energi, dimana pembangunan infrastruktur energi masih didominasi penggunaan energi fosil sebesar 71,86% dan masih rendahnya pembangunan infrastruktur energi baru terbarukan sehingga capaian energi baru terbarukan baru mencapai 28,14% pada tahun 2024.
2. Tingginya kebakaran hutan dan lahan, akibat alih fungsi lahan gambut sebagai penyimpan air mengalami kerusakan karena aktivitas manusia seperti pembukaan lahan baru untuk pertanian dan perkebunan.
3. Pengelolaan sungai dan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang belum tertata dengan baik merupakan salah satu penyebab utama tingginya resiko banjir yang meningkat yang merupakan hasil dari degradasi lingkungan hidup dan juga terjadi alih fungsi lahan yang tidak terkendali juga berkontribusi signifikan terhadap risiko banjir terutama pada konversi lahan alami pada area perkotaan atau pertanian mengurangi kemampuan tanah untuk menyerap air hujan.
4. Banyaknya pemukiman yang berada di sempadan Sungai juga menjadi salah satu permasalahan penyebab banjir, banyaknya penduduk yang memilih tinggal di daerah rawan banjir karena keterbatasan lahan dan akses ekonomi.
5. Terjadinya abrasi yang ada di Provinsi Riau saat ini sudah cukup memprihatinkan, mengingat panjangnya garis pantai Provinsi Riau serta abrasi di wilayah pesisir dengan panjang abrasi pantai di 3 pulau terluar (Rupat, Bengkalis, dan Rangsang) dengan tingkat kekritisannya tinggi sepanjang 167,22 km.

## 7. Kurang Pengamalan Budaya Dalam Kehidupan Bermasyarakat

Hal ini dipengaruhi oleh belum optimalnya Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) yang terdiri atas pengelolaan, pelestarian dan pemanfaatan budaya melayu itu sendiri dalam berkehidupan dimasyarakat, dimana budaya yang ditinggalkan oleh leluhur belum semuanya terdokumentasi dengan baik sehingga pelestarian budaya itu sendiri belum dapat diinternalisasi secara utuh dalam kehidupan masyarakat dan baik sebagai upaya untuk mengekspresikan budaya itu sendiri maupun sebagai upaya pemanfaatan budaya dalam industri pariwisata dan ekonomi kreatif.

Berbagai persoalan lainnya seperti hilirasi produksi sumber-sumber ekonomi, ketimpangan pendapatan, kemiskinan, pengangguran maupun upaya memberdayakan posisi strategis Riau di tengah Pulau Sumatera yang juga berbatas langsung dengan negara tetangga berikut persoalan ikutannya tentu tetap menjadi atensi yang penting



**01** Peningkatan Kualitas **SUMBE  
DAYA MANUSIA**



**02** **PERTUBUHAN EKONOMI**  
yang berkualitas



**03** **TATA KELOLA  
PEMERINTAHAN** yang  
baik dan berkualitas



**04** **PENYEDIAN  
INFRASTRUKTUR** yang  
berkualitas dan ramah  
lingkungan serta  
pengawasan  
pemanfaatannya



**05** **PENGENDALIAN DAN  
PENGAWASAN** terhadap  
Pencemaran dan Kerusakan  
Lingkungan Hidup



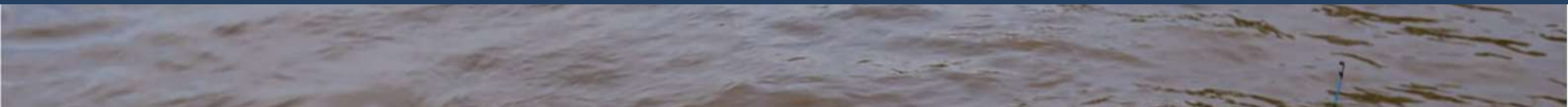
**06** **PUSAT KEBUDAYAAN MELA**







**RANCANGAN AWAL**  
**RPJMD PROVINSI RIAU 2025-2029**





# VISI RIAU 2025-2029

## BERBUDAYA MELAYU

- Memahami dan mempedomani nilai-nilai budaya melayu dan kearifan lokal.
- Bersikap dan berperilaku sesuai nilai dan norma budaya melayu.



## EKOLOGIS

- Lingkungan terjaga dan Lestari.
- Pembangunan dan seimbang dan berkelanjutan.
- Menerapkan kaedah *green economic* menuju pada *blue economic*.



Riau yang  
BERBUDAYA  
MELAYU, DINAMIS,  
EKOLOGIS, AGAMIS  
dan MAJU  
(RIAU BEDELAU)



## DINAMIS

- Mutakhir dan mudah melakukan perubahan untuk akselerasi pembangunan.
- Cepat beradaptasi dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat.



## AGAMIS

- Menjadikan agama sebagai pondasi berkehidupan dan arah kebijakan pembangunan.
- Saling menghargai, menghormati dan menjaga toleransi antar umat beragama untuk persatuan.



## MAJU

- Mandiri dan berdaya saing tinggi.
- Infrastruktur dan industri yang kuat dan handal.
- Ekonomi yang terus bertumbuh dalam lingkungan lestari.
- *Good and clean government* serta pelayanan masyarakat yang prima.
- Adaptasi teknologi, inovasi dan modernisasi.
- Pembangunan yang adil dan merata.
- Kemiskinan dan pengangguran yang terus berkurang.
- Masyarakat Aman, cerdas, sehat dan sejahtera untuk semua.





## MISI RIAU 2025-2029

1

**Membangun manusia yang sehat dan berkualitas melalui pelayanan Pendidikan dan kesehatan yang merata** dan berkeadilan serta keberpihakan pada disabilitas dan kelompok marjinal

2

**Meningkatkan perekonomian, daya saing dan kesejahteraan masyarakat** melalui pemanfaatan sumberdaya secara optimal dalam kerangka pembangunan yang berkelanjutan

3

**Memperkuat infrastruktur yang handal** guna kemudahan akses, pelayanan masyarakat dan perekonomian serta peningkatan konektivitas antar wilayah

4

**Memerangi kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan antar masyarakat dan antar wilayah** serta menjaga keseimbangan dan pemerataan pembangunan

5

**Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berintegritas** serta pelayanan publik yang berkualitas dengan dukungan aparatur yang berkompeten dan profesional menuju **World Class Government**

6

**Memperkuat riset dan inovasi** serta kerjasama pembangunan guna akselerasi capaian pembangunan melalui public private partnership

7

**Mewujudkan kebudayaan melayu sebagai alat pemersatu dan mewujudkan nilai-nilai kearifan lokal** serta mendorong kehidupan bermasyarakat yang kondusif, aman, nyaman dan adil untuk semua

## PROGRAM PRIORITAS RIAU



**RIAU CERDAS**



**RIAU SEHAT**



**RIAU MANTAP**



**RIAU BERDAYA  
SAING**



**RIAU MEMBANGUN DESA  
MAJUKAN KOTA**



**RIAU SEJAHTERA**



## RIAU CERDAS

1. PENDIDIKAN GRATIS SMA/SMK DAN MADRASAH SERTA DUKUNGAN PENGUATAN PENDIDIKAN DASAR KAB/KOTA
2. BEASISWA PENDIDIKAN SARJAN S1, S2, S3 BAGI MAHASISWA BERPRESTASI DAN TENAGA PENDIDIK
3. PENINGKATAN KUANTITAS, KUALITAS DAN KESEJAHTERAAN TENAGA PENDIDIK YANG MERATA DAN BERKEADILAN
4. DUKUNGAN KERJASAMA UNIVERSITAS/PERGURUAN TINGGI
5. BEASISWA PENDIDIKAN BAGI DISABILITAS DAN KELOMPOK MARJINAL
6. PENGUATAN MORALITAS DAN KEAGAMAAN
7. DUKUNGAN PENGUATAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
8. PENGUATAN SARANA DAN PRASARANA KEPENDIDIKAN, MELALUI PEMBANGUNAN GEDUNG SEKOLAH, RUANG KELAS BARU, JALAN AKSES, SARANA PRASARANA MENGAJAR DAN SAPRAS LAINNYA SECARA MERATA
9. MENDORONG PENINGKATAN PROGRAM PERTUKARAN MAHASISWA/PELAJAR, MAGANG KERJA DAN KERJASAMA PENDIDIKAN LINTAS NEGARA
10. MEMBANTU MENINGKATKAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN SDM PONDOK PESANTREN (BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PESANTREN) BANTUAN 300 PESANTREN
11. MEMBUAT INSTITUT QURAN RIAU SEBAGAI PUSAT KAJIAN AL-QURAN INTERNASIONAL ASIA TENGGARA DAN PUSAT KAJIAN LITERATUR ULAMA MELAYU
12. MEMBUATKAN ASRAMA UNTUK PUTRA/RI YANG BELAJAR DILUAR NEGERI, TERUTAMA DI MESIR
13. BEASISWA MAHASISWA KE AHQAF UNIVERSITY YAMAN, AL AZHAR UNIVERSITY MESIR
14. BANTUAN INSENTIF GURU AGAMA



## RIAU SEHAT

1. DUKUNGAN PENGUATAN UHC DAN PENINGKATAN JKN DI PROVINSI RIAU
2. PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING SEJAK DINI
3. PENCEGAHAN WASTING (GIZI BURUK) MELALUI DUKUNGAN ASUPAN BERGIZI DAN SOSIALISASI MAKAN SEHAT DAN BERGIZI
4. PENGUATAN SARANA PRASARANA DAN PENINGKATAN PELAYANAN POSYANDU DAN RS
5. PENCEGAHAN DAN ANTISIPASI DINI PENYEBARAN WADAH DAN PENYAKIT MENULAR
6. PENINGKATAN JUMLAH DAN KOMPETENSI DOKTER DAN TENAGA MEDIS SERTA DISTRIBUSI MERATA
7. PENGUATAN DAN DUKUNGAN DOKTER SPESIALIS SERTA FASILITASI PUSKESMAS MANDIRI
8. PENGUATAN KERJA SAMA KESEHATAN LINGKUP REGIONAL DAN GLOBAL
9. DUKUNGAN PENGEMBANGAN RUMAH SEHAT DAN WISATA KESEHATAN
10. GERAKAN HIDUP SEHAT MELALUI POLA MAKAN BERGIZI DAN GEMAR OLAGRAGA
11. PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT OTAK DAN JANTUNG
12. AMBULAN BERBASIS KECAMATAN
13. OPTIMALISASI KADER POSYANDU





## RIAUMANTAP

1. PEMEKARAN WILAYAH GUNA AKSELERASI DAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2. MENDORONG KETAHANAN ENERGI SERTA PEMANFAATAN ENERGI BERKELANJUTAN
3. PEMBANGUNAN TPST REGIONAL UNTUK PENGELOLAAN LIMBAH YANG BERKELANJUTAN
4. DUKUNGAN PENYELESAIAN BANJIR KABUPATEN/KOTA
5. PENINGKATAN PENYEDIAAN AIR BERSIH
6. PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI DAN SANITASI
7. PENINGKATAN INFRASTRUKTUR WILAYAH PESISIR DAN SENTRA-SENTRA
8. PRODUKSI PENGUATAN KERJASAMA DAERAH PEKANSIKAWAN, SIAP, BEDELAU DAN KERJASAMA STRATEGIS LAINNYA
9. PENINGKATAN JALAN MANTAP PROVINSI RIAU, ANTARA LAIN:
  - ☐ PEMBANGUNAN JALAN SHORTCUT BAGAN – PASIR PENGARAIAN
  - ☐ (PENYELESAIAN JALAN DALU DALU – MAHATO)
  - ☐ PENYELESAIAN JALAN DUMAI – LB GAUNG - SINABOI
  - ☐ PEMBANGUNAN JALAN SHORTCUT PEKANBARU – TEMBILAHAN
  - ☐ (JALUR SOREK – TELUKMERANTI - GUNTUNG)
  - ☐ PEMBANGUNAN JALAN LB. JAMBI – SP IBUL - SP IFA – PK KASAI
  - ☐ DUKUNGAN PENYELESAIAN OUTER RING ROAD METROPOLITAN PEKANBARU
10. PEMBANGUNAN ISLAMIC CENTRE PROVINSI RIAU
11. PEMBANGUNAN JEMBATAN SEI PAKNING – BENGKALIS
12. PEMBANGUNAN FLY OVER SIMPANG PANAM
13. RELOKASI BANDARA SSQII PEKANBARU
14. PEMBANGUNAN JEMBATAN DUMAI – P.RUPAT
15. PEMBANGUNAN KAWASAN KANTOR TERPADU (RIAUTOWER)
16. PEMBANGUNAN HOTEL RIAU – SLIPI JAKARTA
17. PENYIAPAN JALUR KERETA BARANG PENUNJANG INDUSTRI DAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT
20. PERBAIKAN JALAN PRODUKSI
21. KONEKTIFITAS TOL DENGAN SENTRA PRODUKSI DENGAN KEBUN SAWIT
22. PENINGKATAN INFRASTRUKTUR WILAYAH PESISIR DAN SENTRA-SENTRA PRODUKSI



## RIAUBERDAYA SAING

1. HILIRISASI PRODUK PADA SEKTOR - SEKTOR UNGGULAN
2. PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI DI PROVINSI RIAU
3. DUKUNGAN PEMBANGUNAN PUSAT - PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI
4. DUKUNGAN PENGEMBANGAN POTENSI UNGGULAN DI 12 KAB/KOTA UNTUK PEMERATAAN DAN STIMULUS PEMBANGUNAN
5. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN DAERAH
6. REORIENTASI PEMBANGUNAN SEKTOR – SEKTOR PEREKONOMIAN, PERTANIAN, PERDAGANGAN, WISATA, INDUSTRI DAN SEKTOR STRATEGIS LAINNYA
7. PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH:
  - ☐ BANTUAN PERMODALAN UMKM, RP. 5 - 15 JUTA / TAHUN (TOTAL RP. 50 MILYAR DALAM PERIODE 5 TAHUN)
  - ☐ PENGUATAN RISET DAN INOVASI SERTA PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIGITAL
  - ☐ PENGUATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESSIONAL DAN BERINTEGRITAS
  - ☐ PENINGKATAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN
  - ☐ PENINGKATAN PENATAAN DAN REFORMASI BIROKRASI
  - ☐ PENINGKATAN KUANTITAS DAN KUALITAS SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAHAN
  - ☐ DIGITALISASI PEMERINTAHAN
  - ☐ PENGUATAN KAPASITAS DAN KEBIJAKAN FISKAL DAERAH YANG BERTUMPU PADA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN KEMAJUAN PEMBANGUNAN
  - ☐ PENGUATAN BUMD KHUSUSNYA DI SEKTOR MIGAS, PANGAN, KEUANGAN DAN SEKTOR STRATEGIS LAINNYA UNTUK KEMAKMURAN MASYARAKAT
  - ☐ FASILITASI DAN DUKUNGAN KENYAMANAN SERTA KEMUDAHAN BERINVESTASI
  - ☐ DUKUNGAN PENGUATAN DAN PERMODALAN USAHA KOPERASI
  - ☐ PEMBANGUNAN *SMART PROVINCE*, PENGEMBANGAN *PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP* DAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
8. MENGEMBANGKAN KAWASAN EKONOMI BURUK BAKUL SEBAGAI PENUNJANG AKTIFITAS EKONOMI DIKAWASAN PERAIRAN SELAT MALAKA
9. KEBIJAKAN EKONOMI SYARIAH PROVINSI RIAU
10. PEMBANGUNAN BANK UNTUK ANAK MUDA UNTUK MEMBANGUN USAHA
11. PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI MELALUI PENYEDIAAN MODAL USAHA DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA. PENTINGNYA MEMAJUKAN SEKTOR PERTANIAN, TERUTAMA DENGAN MENGOLAH SAMPAH PERTANIAN MENJADI PAKAN TERNAK
12. (PROGRAM KHUSUS UNTUK USAHA PEMUDA (CSR)
13. SILATURAHMI DILAKUKAN UNTUK MERUMUSKAN KEBIJAKAN WAJIB PLAT BM ATAU PEMBANGUNAN JALAN KHUSUS YANG DIBANGUN SENDIRI OLEH PENGUSAHA/PERUSAHAAN
14. **MASTERPLAN PENGEMBANGAN EKONOMI, INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH PROVINSI RIAU (MPEIPW)**



## RIAU SEJAHTERA

1. PENINGKATAN PENDAPATAN, PERTUMBUHAN EKONOMI, DAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN
2. PENUNTASAN KEMISKINAN EKSTREM DAN PENURUNAN ANGKA KEMISKINAN DAERAH
3. PENINGKATAN PELUANG KERJA DAN PENURUNAN ANGKA PENGANGGURAN
4. PENGUATAN JIWA USAHA / ENTREPRENEUR DAN PENINGKATAN PELUANG USAHA DI MASYARAKAT
5. DUKUNGAN PENINGKATAN KENYAMANAN, KEAMANAN, TOLERANSI DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT.
6. PEMBANGUNAN BLK DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
7. PENINGKATAN KESEJAHTERAAN GURU MDA, IMAM MESJID, PENYELENGGARA JENAZAH, PENGGALI KUBUR, PEGIAT DAKWAH DAN GURU NGAJI DENGAN INSENTIF YANG LAYAK, DIBUATKAN KONTRAK DAN DIBERIKAN HONOR DAERAH
8. INSENTIF RT DAN RW
9. PEMANFAATAN ALUMNI TIMTENG YANG SUDAH PULANG KE RIAU, DIANGKAT MENJADI TENAGA PENGAJAR, DIJADIKAN PENYULUH AGAMA DAN BERBAGAI BIDANG KEAGAMAAN LAINNYA,
10. LEGALITAS TENAGA KERJA INDONESIA
11. PENINGKATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN MELAYU RIAU
12. PENINGKATAN PELESTARIAN BUDAYA MELAYU RIAU
13. PEMBINAAN DAN PENGUATAN TOLERANSI, SALING PENGERTIAN, SALING MENGHORMATI, MENGHARGAI KESETARAAN DAN KERJASAMA DALAM KEHIDUPAN UMAT BERAGAMA DAN MASYARAKAT
14. MEMBUATKAN MESJID ATAU MERENOVASI MASJID/ MUSHOLA DI DAERAH-DAERAH YANG PERLU KEBERADAAN MASJID
15. OPTIMALISASI PERAN MESJID RAYA (MESJID RAYA ANNUR PROVINSI RIAU, MESJID RAYA NURUL WATHAN, MESJID RAYA MAQARI, MESJID ALHIDAYAH GUBERNURAN) UNTUK PENGAJIAN KITAB-KITAB ULAMA KLASIK DAN MODERN NEGERI MELAYU BERHALUAN AHLUSSUNAH WALJAMAAH, BERMAZHAB SYAFII DAN BERTASAWUF SUNNI SERTA MENJADIKAN OBJEK WISATA RELIGI UNTUK MENGENALKAN BUDAYA MELAYU
16. MEMBUAT KEBIJAKAN ZAKAT POTONG ATAS, UNTUK PEMBIAYAAN PROGRAM-PROGRAM KEMASLAHATAN UMAT BERSAMA SUPOORT APBD
17. MENERTIBKAN ASET-ASET WAKAF DALAM WILAYAH BWI PROVINSI RIAU DAN MENGELOLA DENGAN BAIK
18. MELAKUKAN PEMBINAAN TERHADAP IMAM-IMAM MESJID UNTUK BELAJAR ILMU-ILMU AL QURAN MENGHAFAZ AL QURAN DAN MENDAPATKAN SANAD AL QURAN
19. INSENTIF UNTUK PARA PEGIAT DAKWAH PROVINSI RIAU
20. PENGEMBANGAN WISATA RELIGI
21. PEMBINAAN KEPEMUDAAN DAN KELUARGA SEJAHTERA DALAM PENGURANGAN PENYAKIT MASYARAKAT (NARKOBA, LGBT, PERZINAHAN, HIDUP HEDONS, GAME ONLINE, PINJAMAN ONLINE DAN PENYAKIT MASYARAKAT LAINNYA)



## RIAU MEMBANGUN DESA MAJUKAN KOTA

1. Fasilitasi dan Dukungan Penyelesaian Persoalan Sampah, Banjir dan Air Bersih
2. Peningkatan Transportasi Publik di Perkotaan
3. Mendorong Pengembangan Kota Tematik Sesuai Potensi Daerah, seperti Kota Pendidikan, Kota Cerdas (*Smart City*), Kota Budaya, dan Lainnya.
4. Bantuan Keuangan Desa untuk Memperkuat Infrastruktur, SDM dan Ekonomi Kerakyatan
5. Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga Desa





# 01

Membangun manusia yang sehat dan berkualitas melalui pelayanan Pendidikan dan kesehatan yang merata dan berkeadilan serta keberpihakan pada disabilitas dan kelompok marginal



## SASARAN

- Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat



## ARAH KEBIJAKAN

- Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 Tahun Pendidikan Prasekolah dan 12 Tahun Pendidikan Dasar dan Menengah)
- Penguatan Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berkualitas
- Dukungan Pemerataan Akses Pendidikan Tinggi Berkualitas dan Pengembangan STEAM
- Pemenuhan Layanan Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang Berkualitas
- Pemenuhan Hak Dasar, Pengurangan Beban Hidup dan Perbaikan Kualitas Hidup Masyarakat Miskin di sektor Pendidikan



## STRATEGI

- Penyaluran bantuan pendidikan dengan tepat sasaran (Pendidikan Gratis)
- Pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS)
- Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan berkualitas
- Peningkatan Akses Pendidikan bagi Penyandang Disabilitas dan Kelompok Marginal
- Perluasan dan penguatan kualitas layanan PAUD selama 1 tahun pendidikan prasekolah
- Peningkatan kuantitas, kualitas dan kesejahteraan Tenaga Pendidik yang merata dan berkeadilan
- Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi berkualitas
- Pengembangan pembelajaran berbasis science, technology, engineering, arts, mathematics (STEAM) dan prodi STEAM
- Peningkatan kualitas layanan pendidikan pesantren serta pendidikan keagamaan
- Penguatan kualitas dan rekognisi lulusan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan
- Pembangunan Islamic Center
- Peningkatan Akses Pelayanan Dasar Pendidikan untuk Masyarakat Miskin



## SASARAN

- Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat



## ARAH KEBIJAKAN

- Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan
- Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan
- Peningkatan kualitas, kesejahteraan, dan pemerataan tenaga kesehatan
- Percepatan penuntasan dan pencegahan stunting
- Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat
- Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis
- Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat
- Pemenuhan Hak Dasar, Pengurangan Beban Hidup dan Perbaikan Kualitas Hidup Masyarakat Miskin di sektor Kesehatan



## STRATEGI

- Peningkatan dan Penguatan Jaminan Kesehatan Nasional
- Peningkatan sarana prasarana RS sesuai standar layanan
- Peningkatan promosi wisata melalui kerjasama dengan Rumah Sakit berstandar internasional
- Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan sesuai standar
- Penguatan tata kelola dan pemantauan status gizi masyarakat
- Peningkatan kualitas intervensi pada kelompok sasaran
- Peningkatan promosi kesehatan dan perubahan perilaku pola pengasuhan
- Peningkatan akses pangan bergizi
- Pembudayaan perilaku hidup sehat dari usia dini dalam lingkungan keluarga dan dunia Pendidikan
- Mitigasi sumber dan resiko penyakit menular dan penyakit tropis
- Pengendalian potensi wabah dan KLB
- Peningkatan Akses Pelayanan Dasar dan Perlindungan Kesehatan untuk Masyarakat Miskin

| TUJUAN | INDIKATOR | INDIKATOR |
|--------|-----------|-----------|
|--------|-----------|-----------|

1.1 Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Sehat, Cerdas, Kreatif, Unggul, Sejahtera dan Inklusif

Indeks Modal Manusia (poin)

1.1.1 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat  
1.1.2 Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat

Indeks Modal Manusia (poin)

Umur Harapan Hidup (tahun)  
Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun (tahun)  
Harapan Lama Sekolah (tahun)



## PROGRAM PRIORITAS

## RIAU SEHAT & RIAU CERDAS





**Meningkatkan perekonomian, daya saing dan kesejahteraan masyarakat** melalui pemanfaatan sumberdaya secara optimal dalam kerangka pembangunan yang berkelanjutan



### SASARAN

- Meningkatnya Kemandirian Ekonomi
- Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah



### ARAH KEBIJAKAN

- Pengembangan industri pengolahan yang ramah lingkungan berbasis keunggulan wilayah
- Peningkatan ketahanan pangan daerah
- Pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin di sektor pangan



### SASARAN

- Meningkatnya Realisasi Investasi
- Meningkatnya Daya Saing Daerah
- Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata



### ARAH KEBIJAKAN

- Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses permodalan di tingkat pusat dan daerah
- Peningkatan kesejahteraan petani melalui penyediaan modal usaha dan teknologi tepat guna
- Penguatan Kapasitas dan Kebijakan Fiskal Daerah
- Peningkatan produktifitas BUMD dalam mendukung pembangunan daerah
- Peningkatan pembangunan desa inklusif
- Penataan amenitas, peningkatan SDM Pariwisata dan manajemen pengelolaan destinasi wisata



### STRATEGI 9

- Fasilitasi dan Dukungan Kemudahan Berinvestasi pada sektor ekonomi biru dan ekonomi hijau
- Peningkatan Potensi PAD
- Pengembangan pariwisata berbasis Ekowisata dengan melibatkan masyarakat

| TUJUAN                                                                    | SASARAN                                                                                                                                                                                                              | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1 Meningkatkan ekonomi yang berdaya Saing                               | 2.1.1 Meningkatnya Kemandirian Ekonomi<br>2.1.2 Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah<br>2.1.3 Meningkatnya realisasi investasi<br>2.1.4 Meningkatnya Daya Saing daerah<br>2.1.5 Meningkatnya nilai tambah pariwisata | PDRB ADHB per kapita<br>Pertumbuhan Ekonomi<br>Kontribusi PDRB Industri Pengolahan<br>Indeks Ketahanan Pangan<br>Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment)<br>Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)                                                                                                                                                                                  |
| 2.2 Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang Berwawasan Lingkungan dan Lestari | 2.2.1 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Daerah<br>2.2.2 Menurunnya Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca<br>2.2.3 Mengurangi Risiko Bencana Daerah                                                                    | Indeks Daya Saing Daerah<br>Jumlah pengeluaran wisatawan mancanegara<br>Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)<br>Indeks Ekonomi Hijau Daerah<br>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup<br>Indeks Kualitas Lahan<br>Indeks Kualitas Air<br>Indeks Kualitas Udara<br>Indeks Kualitas Air Laut<br>Persentase penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca<br>Porsi EBT dalam bauran energi primer<br>Indeks Risiko Bencana Daerah |



## PROGRAM PRIORITAS

**RIAU BERDAYA SAING & RIAU MEMBANGUN DESA DAN MAJUKAN KOTA**





## 03

**Memperkuat infrastruktur yang handal** guna kemudahan akses, pelayanan masyarakat dan perekonomian serta peningkatan konektivitas antar wilayah

### SASARAN

- Meningkatnya Layanan Transportasi
- Meningkatnya cakupan layanan infrastruktur dasar
- Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Daerah
- Menurunnya Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca
- Mengurangi Risiko Bencana Daerah

### ARAH KEBIJAKAN

- Peningkatan infrastruktur untuk konektivitas wilayah
- Peningkatan Infrastruktur Dasar
- Pemenuhan Hak Dasar, Pengurangan Beban Hidup dan Perbaikan Kualitas Hidup Masyarakat Miskin di sektor infrastruktur dasar
- Mendorong pembangunan, pengembangan dan peningkatan infrastruktur ke kawasan strategis Provinsi Riau
- Percepatan Pembangunan Pengelolaan Limbah dan Persampahan yang Berkelanjutan
- Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
- Percepatan Pembangunan Pengelolaan Limbah dan Persampahan yang Berkelanjutan
- Mendorong Ketahanan Energi serta Pemanfaatan Energi Berkelanjutan
- Peningkatan Infrastruktur untuk Penanganan Bencana
- Meningkatkan kerjasama kemitraan (pihak swasta) dalam rangka pengurangan resiko bencana

### STRATEGI

- Pemantapan jalan dan peningkatan tingkat aksesibilitas
- Peningkatan infrastruktur menuju kawasan sentra produksi
- Mendorong pembangunan bandar udara
- Mendorong terwujudnya pembangunan jalur kereta api
- Penguatan kerjasama antar wilayah untuk penerapan angkutan aglomerasi
- Dukungan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
- Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum perpipaan
- Percepatan pembangunan Rumah Layak Huni yang bersanitasi aman
- Peningkatan Akses Pelayanan Dasar Air Minum Bersih, Sanitasi Layak dan Lisrik Bagi Masyarakat Miskin
- Penguatan kelembagaan kerjasama dan pengembangan antar wilayah
- Penguatan kelembagaan dan fasilitasi percepatan pengembangan kawasan industri serta kawasan stratej
- Mendorong pembangunan TPST Regional dan sistem air limbah terpadu
- Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan
- Mendorong pembangunan TPST Regional dan sistem air limbah terpadu
- Mendorong kerjasama stakeholder di Bidang Ketahanan Energi
- Membangun infrastruktur EBT dan ketenagalistrikan
- Pengendalian abrasi sungai dan pantai
- Dukungan Penyelesaian Banjir Kabupaten/Kota melalui penurunan titik terdampak banjir dan genangan
- Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla)
- Meningkatkan kemitraan multisektor dan multi stakeholder dalam rangka pengurangan resiko bencana

| TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR |
|--------|---------|-----------|
|--------|---------|-----------|

3.1 Mewujudkan Infrastruktur yang handal

3.1.1 Meningkatnya Layanan Transportasi

Persentase Kualitas Layanan Infrastruktur (%)  
Rasio Konektivitas simpul Transportasi Provinsi

3.1.2 Meningkatnya cakupan layanan infrastruktur dasar

Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)  
Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)

**PROGRAM  
PRIORITAS**

**RIAU MANTAP  
& RIAU MEMBANGUN  
DESA DAN MAJUKAN KOTA**



## 04

**Memerangi kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan antar masyarakat dan antar wilayah** serta menjaga keseimbangan dan pemerataan pembangunan



### SASARAN

- ☐ Berkurangnya Kesenjangan Antar Masyarakat dan Antar Wilayah
- ☐ Meningkatkan
- ☐ Pemberdayaan, Produktivitas, dan Pendapatan Masyarakat
- ☐ Meningkatnya perlindungan Sosial yang Adaptif dan Inklusif



### STRATEGI

- ☐ Peningkatan pembangunan desa dan kawasan pedesaan yang Inklusif untuk membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru
- ☐ Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh
- ☐ Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Tenaga Kerja
- ☐ Sertifikasi dan Skill Tenaga Kerja Pelatihan dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja
- ☐ Pemberdayaan Masyarakat, Pengembangan dan Perluasan Unit usaha Ekonomi Desa, branding Desa sebagai upaya peningkatan Pendapatan dan daya saing daerah.
- ☐ Penguatan Jiwa Usaha / Entrepreneur, Wirausaha, Pelatihan UMKM dan Peningkatan Peluang Usaha di Masyarakat
- ☐ Penguatan Kelembagaan dan Akses Permodalan UMKM
- ☐ Penguatan proses bisnis dan kelembagaan koperasi serta adopsi teknologi
- ☐ Peningkatan Akses Pasar
- ☐ Peningkatan Kualitas Produk dan Keahlian SDM
- ☐ Fasilitasi Teknologi dan Sarana Prasarana Produksi
- ☐ Perlindungan Sosial yang integratif, adaptif dan inklusif
- ☐ Peningkatan layanan kepemilikan dokumen kependudukan dan tertib administrasi kependudukan bagi masyarakat miskin, rentan dan marginal
- ☐ Updating data pensasaran kemiskinan dan pemanfaatan data regsosek dalam perencanaan pembangunan dan pensasaran program bagi masyarakat



### ARAH KEBIJAKAN

- ☐ Pemerataan Pembangunan dan Pengurangan Wilayah Kantong Kemiskinan
- ☐ Peningkatan Pendapatan dan Pemberdayaan Masyarakat
- ☐ Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM
- ☐ Pemenuhan Hak Dasar, Pengurangan Beban Hidup dan Perbaikan Kualitas Hidup Masyarakat Miskin

| TUJUAN                          | SASARAN                                                                    | INDIKATOR                                                                                                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1 Menurunkan Angka Kemiskinan |                                                                            | Tingkat Kemiskinan                                                                                                               |
|                                 | 4.1.1 Berkurangnya Kesenjangan Antar Masyarakat dan Antar Wilayah          | <input type="checkbox"/> Presentase Penduduk Miskin Desa<br><input type="checkbox"/> Presentase Penduduk Miskin Kota             |
|                                 | 4.1.2. Meningkatkan Pemberdayaan, Produktivitas, dan Pendapatan Masyarakat | <input type="checkbox"/> Tingkat Pengeluaran Perkapita Masyarakat Miskin (Ribu)<br><input type="checkbox"/> Tingkat Pengangguran |
|                                 | 4.1.3 Meningkatnya perlindungan Sosial yang Adaptif dan Inklusif           | Presentase Penduduk Miskin yang memiliki setidaknya satu Jaminan Sosial (PKH, KKS, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun)         |



**PROGRAM  
PRIORITAS**

**RIAU SEJAHTERA  
& RIAU MEMBANGUN DESA,  
MAJUKAN KOTA**





## 05

### SASARAN

- ❑ Meningkatnya budaya birokrasi berakhlak dengan ASN yang profesional

### ARAH KEBIJAKAN

- ❑ Peningkatan Profesionalitas ASN

### STRATEGI

- ❑ Peningkatan Kapasitas ASN (Kualifikasi Pendidikan, Kompetensi, Kinerja, dan Kedisiplinan Pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya)
- ❑ Peningkatan Implementasi Merit Sistem
- ❑ Peningkatan Budaya Kerja dan Pelayanan Prima

### SASARAN

- ❑ Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel

### ARAH KEBIJAKAN

- ❑ Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Professional dan Berintegritas

### STRATEGI

- ❑ Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana Pemerintahan Digitalisasi Pemerintahan
- ❑ Peningkatan Pengelolaan Tata Laksanan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- ❑ Peningkatan infrastruktur layanan pemerintah (pembangunan gedung strategis)
- ❑ Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi
- ❑ Peningkatan penataan dan reformasi birokrasi kelembagaan
- ❑ Pembangunan Zona Integritas dan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).pada unit kerja
- ❑ Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)
- ❑ Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi

**Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berintegritas** serta pelayanan publik yang berkualitas dengan dukungan aparatur yang berkompeten dan professional menuju **World Class Goverment**

| TUJUAN                                               | SASARAN                                                                                          | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. 1 Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan yang baik |                                                                                                  | Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                      | 5.1.1 Meningkatnya budaya birokrasi berakhlak dengan ASN yang profesional                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>❑ Nilai survey Indeks Berakhlak</li> <li>❑ Nilai Survey Kepuasan Masyarakat</li> </ul>                                                                                                                                                    |
|                                                      | 5.1.2 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel | <ul style="list-style-type: none"> <li>❑ 'Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)</li> <li>❑ Indeks Pelayanan Publik</li> <li>❑ 'Capaian akuntabilitas Kinerja</li> <li>❑ 'Capaian akuntabilitas keuangan</li> <li>❑ 'Nilai survey penilaian integritas</li> </ul> |



**PROGRAM  
PRIORITAS**

**RIAU BERDAYA SAING**



## SASARAN

- ☐ Meningkatnya pemanfaatan riset untuk pembangunan
- ☐ Meningkatnya inovasi dan penggunaan IPTEK



## ARAH KEBIJAKAN

- ☐ Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK serta pemanfaatan teknologi digital



## STRATEGI

- ☐ Perumusan kebijakan Perencanaan Pembangunan berbasis Riset dan Inovasi
- ☐ Kemitraan Riset dan Inovasi
- ☐ Penguatan Kapasitas Kelembagaan Riset dan Inovasi

# 06

**Memperkuat riset dan inovasi** serta kerjasama pembangunan guna akselerasi capaian pembangunan melalui public private partnership

| TUJUAN                                            | SASARAN                                                | INDIKATOR                                                   |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 6. 1 Penguatan ekosistem riset dan inovasi daerah |                                                        | Indeks Inovasi Daerah                                       |
|                                                   | 6.1.1 Meningkatnya pemanfaatan riset untuk pembangunan | <input type="checkbox"/> Presentase pemanfaatan hasil riset |
|                                                   | 6.1.2 Meningkatnya inovasi dan penggunaan IPTEK        | <input type="checkbox"/> Indeks masyarakat digital          |



**PROGRAM  
PRIORITAS**

→ **RIAU BERDAYA SAING**





## SASARAN

- ☐ Meningkatnya pemajuan kebudayaan melayu
- ☐ Meningkatnya kerukunan sosial antar masyarakat



## ARAH KEBIJAKAN

- ☐ Peningkatan dan pengembangan aktivitas keagamaan berbasis budaya melayu serta pembinaan SDM yang berakhlakbudaya melayu serta pembinaan SDM yang berakhlak
- ☐ Penguatan nilai luhur kebudayaan Melayu Riau dalam lingkungan masyarakat yang agamis
- ☐ Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan
- ☐ Dukungan Peningkatan Kenyamanan, Keamanan, Toleransi dan Kesejahteraan Rakyat



## STRATEGI

- ☐ Dukungan pengembangan wisata religi
- ☐ Peningkatan pengelolaan dan pengembangan pemajuan kebudayaan Melayu Riau
- ☐ Peningkatan pelestarian budaya Melayu Riau
- ☐ Peningkatan Pengamalan Nilai Nilai Agama dan Budaya Melayu
- ☐ Pembinaan dan penguatan toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dan kerjasama dalam kehidupan umat beragama dan masyarakat
- ☐ Pembinaan Kepemudaan dan Keluarga Sejahtera dalam pengurangan penyakit masyarakat (narkoba, LGBT, perzinahan, hidup hedons, game online, pinjaman online dan penyakit masyarakat lainnya)
- ☐ Pencegahan Konflik
- ☐ Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum

# 07

**Mewujudkan kebudayaan melayu sebagai alat pemersatu dan mewujudkan nilai nilai kearifan lokal** serta mendorong kehidupan bermasyarakat yang kondusif, aman, nyaman dan adil untuk semua

| TUJUAN                                                                                                  | SASARAN                                                 | INDIKATOR                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 7. 1<br>Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat berlandaskan pada kebudayaan melayu yang agamis |                                                         | Indeks Ketahanan Nasionl                                |
|                                                                                                         | 7.1.1<br>Meningkatnya pemajuan kebudayaan melayu        | <input type="checkbox"/> Indeks Pemajuan Kebudayaan     |
|                                                                                                         | 7.1.2<br>Meningkatnya kerukunan sosial antar masyarakat | <input type="checkbox"/> Indeks Kerukunan Umat Beragama |



**2026**

(Tahun 1)

Perkuatan  
Fondasi  
Tranformasi  
dalam  
Meningkatkan  
Daya Saing  
Daerah dan  
Ekonomi  
Inklusif yang  
Berkelanjutan

**2027**

(Tahun 2)

Pemantapan  
Pembangunan  
untuk  
Penguatan Daya  
Saing dan  
Ekonomi Inklusif

**2028**

(Tahun 3)

Meningkatkan  
Kemandirian  
Ekonomi dan  
Daya Saing  
Daerah yang  
Kompetitif

**2029**

(Tahun 4)

Memantapkan  
Kesejahteraan  
Masyarakat,  
Pembangunan  
yang Seimbang  
dan Mandiri  
serta Berdaya  
SaingTinggi

**2030**

(Tahun 5)

Mewujudkan  
Riau yang  
Berbudaya  
Melayu,  
Dinamis,  
Ekologis, Agamis  
dan Maju  
(Riau Bedelau)





**TERIMA KASIH**